

ABSTRAK

Penelitian ini penulis berikan judul: “Analisis Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Terhadap Kebijakan Gubernur DKI Jakarta atas Pengosongan Jabatan Wakil Lurah”. Kebijakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta mengenai pengosongan jabatan wakil lurah merupakan suatu kebijakan diluar Undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang ada, dikarenakan kebijakan tersebut sangatlah bertentangan dengan Peraturan Gubernur dimana Peraturan Gubernur adalah suatu peraturan yang mengatur pemerintahan dalam lingkup daerah mencakup tata kerja kelurahan. Penelitian ini dilakukan dengan cara memperbandingkan antara kebijakan Gubernur DKI Jakarta dengan peraturan Gubernur yang telah ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif yang mana penulis melihat dari Undang-undang, peraturan pemerintah daerah, peraturan Gubernur, maupun melalui buku-buku yang membahas mengenai permasalahan yang sedang penulis teliti. Penelitian ini sendiri bersifat deskriptif artinya hanya memberikan penjelasan atas bagaimana gubernur melakukan kebijakan atas pengosongan jabatan wakil lurah yang mana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur namun dilakukan atas dasar diskresi yang mana suatu pejabat daerah bisa melakukan suatu kebijakan diluar peraturan yang telah ada atas dasar efisiensi dan tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang gubernur sebagai pejabat daerah dapat melakukan sebuah kebijakan pada saat menjabat sebagai pejabat daerah dimana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci: Kewenangan, Organisasi Publik, Efisiensi Organisasi